

**Pemberdayaan Ekonomi Secara Berkelanjutan Perempuan
Nelayan dengan Pelatihan Pembuatan Abon Ikan**
*Sustainability economic empowerment of women in fisheries by
providing a training in creating fish floss products*

Koesrianti¹, Aktieva Tri Tjitrawati², Adhy Riyadh Arafah³

^{1,2,3}Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: koesrianti@fh.unair.ac.id¹, aktieva.tri@fh.unair.ac.id²,

adhy@fh.unair.ac.id³

*Corresponding author: koesrianti@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Wilayah Kenjeran Surabaya merupakan daerah masyarakat nelayan yang terkenal di Surabaya sebagai penghasil ikan. Dalam masa Pandemi Covid-19 masyarakat nelayan Kenjeran terkena dampak dari bencana penyakit virus ini yang menyebabkan permasalahan sosial di wilayah tersebut, misalnya meningkatnya angka perceraian sepanjang tahun 2020. Penyebab utama perceraian ini adalah kemiskinan. Masyarakat nelayan secara nasional berada di bawah garis kemiskinan termasuk masyarakat nelayan Kenjeran. Kelompok perempuan dari masyarakat nelayan Kenjeran merupakan kelompok yang tidak produktif secara ekonomi. Tim PPM melakukan praktik dan pelatihan secara langsung pembuatan abon ikan bagi kelompok perempuan masyarakat nelayan Kenjeran Surabaya dengan pendekatan partisipatif. Hasil dari kegiatan PPM ini yaitu kelompok perempuan masyarakat nelayan Kenjeran mampu mengolah ikan menjadi abon ikan yang dengan proses produksi modern didapatkan produk abon ikan yang tekstur dan rasanya lezat dan layak jual. Kelompok perempuan sebagai bagian dari masyarakat nelayan merupakan nilai strategis untuk menggerakkan perekonomian di masa pandemi covid-19 dengan pendekatan gender. Dalam konteks ini, kegiatan PPM ini merupakan sebuah ajakan untuk mobilisasi kelompok perempuan sebagai modal sosial yang nantinya dapat menggerakkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan (*sustainability*) atas potensi sumber daya laut.

Kata kunci: nelayan, gender, perempuan, Kenjeran Surabaya, olahan ikan

ABSTRACT

Kenjeran district is a famous place as the domicile for fishermen in Surabaya. Due to the Covid-19 pandemic situation when economic has slowed down, the poverty has increased and this lead to the increasing number of divorce in this region in 2020. In general, Indonesia's fisheries sector is classified as poor, and this is a multi-dimensional problem. The majority women in fisheries community has no jobs. Before this problem spreads to the other social community problems, something should be done to help them overcome their economic problems. In this context, this community service is designed to help women in Kenjeran region to have skill on how to make fish floss that delicious and marketable. Women have a strategic value as a spearhead to empower economic sector in the community in this unprecedented Covid-19 pandemic. This community service utilizes gender approach by which it constitutes as an invitation to activate the women in fisheries sector as social capital that can mobilize and empower the economic of fisheries community. It will have lead to a sustainability economic income for fishermen in the region by processing fish as one of marine resources become fish floss products.

Key words: fishermen, gender, women, Kenjeran Surabaya, fish floss products

PENDAHULUAN

Kelompok perempuan nelayan dari kelurahan Kedung Cowek sebagai mitra dari kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) ini berada di Kecamatan Bulak yang merupakan kecamatan yang berada di bagian utara dari Kota Surabaya yang lebih dikenal sebagai wilayah Kenjeran. Kawasan Kenjeran ini memegang peran penting dalam menunjang ekonomi warga sekitar, produsen ikan laut, dan mencegah bencana rob untuk kota Surabaya. Kecamatan Bulak ini terdiri dari empat kelurahan yaitu Bulak, Kedung Cowek, Kenjeran dan Sukolilo baru, populasinya 43 ribu jiwa, luas wilayahnya 6.26 km², dengan mayoritas pekerjaan utama penduduknya sebagai nelayan.

Hasil tangkapan nelayan Kenjeran selama ini meliputi, ikan belanak, ikan glamo, ikan keting, ikan kakap, ikan sembilang, serta udang, gragu (udang kecil), kerang-kerangan (Sudarmaji, 2004). Sebagian besar hasil tangkapan nelayan dijual langsung di pasar sebagai ikan segar dan sebagian lagi dijual dengan cara

diawetkan atau dengan cara diasapkan. Dengan cara penjualan seperti ini kehidupan nelayan secara ekonomi tidak meningkat, kadang merugi karena ikan cepat rusak dan tidak laku. Selain itu, hanya sedikit masyarakat yang gemar makan ikan, meskipun sudah dilakukan sosialisasi secara gencar tentang pentingnya makan ikan. Oleh karena itu, perlu dicari cara lain untuk mengolah produk ikan. Hal ini bukan semata untuk menaikkan perekonomian masyarakat nelayan, tetapi juga kemungkinan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat. Data yang ada di Bapemas menyebutkan bahwa ketrampilan pokok masyarakat yang tersebar di Surabaya yaitu menjahit dasar, tas tangan, handycraft, makanan, sulam pita, produk rumahan, membatik, menjahit, ikat celup, dan jahit kreatif. Dari data ini kelompok masyarakat belum diberikan ketrampilan membuat kecap atau abon berbahan baku ikan.

Tahun 2020, terjadi angka penceraian yang tinggi di wilayah

Kecamatan Kenjeran dengan penyebab terbesar karena masalah ekonomi keluarga yang bertambah parah karena adanya Pandemi Covid-19 (Jawapos.com, 2021). Masalah ekonomi atau kemiskinan di masyarakat nelayan bersifat multidimensi yang merupakan pencetus dari berbagai masalah lainnya. Menurut berita pada masa Pandemi, terjadi peningkatan angka kemiskinan 15-17% dibandingkan pada periode 2019 dan ini sudah masuk pada kategori berat. (Maaruf, 2021). Hal ini perlu segera dicarikan solusinya.

Terkait pemberdayaan kelompok perempuan masyarakat nelayan, ada berbagai macam penelitian yang telah dilakukan. Pada umumnya, menyimpulkan hal yang sama yaitu kelompok perempuan bukan pelaku ekonomi utama keluarga, aktivitas melaut semua dilakukan oleh laki-laki (Handayani, 2015). Perempuan juga hampir tidak mempunyai akses atas pendidikan, ekonomi dan otonomi atas tubuh. Kelompok perempuan (isteri nelayan dan putri nelayan) dianggap cocok untuk didorong mengatasi ekonomi

keluarga. Pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 ini memberikan bantuan sebagai pertolongan ekonomi (economic rescue) yang sifatnya hanya sementara dan tidak dapat mendongkrak tingkat konsumsi ke kondisi normal dengan cepat. Masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah saja. Perlu dicarikan solusi dari permasalahan ini sebelum menjadi parah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga nelayan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian normative, dengan memakai metode penelitian yuridis normative. Dalam konteks ini maka penyusunan artikel didasarkan pada ketentuan hukum yang ada serta fakta di lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan perundangan-undangan (statute approach). Di samping itu, penelitian ini juga didasarkan kepada berbagai teori yang membahas tentang pemberdayaan perempuan. Dari factor-factor tersebut didapatkan suatu benang merah dan dapat ditarik

suatu kesimpulan. Penelitian ini pada dasarnya merupakan hasil dari PPM tahun 2021 Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Bagian Hukum Internasional) yang mengambil tema Pemberdayaan perempuan masyarakat nelayan Kenjeran Surabaya di masa Pandemi Covid-19. Pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan pengolahan abon ikan.

Target dari program pengabdian masyarakat yaitu pemberdayaan ekonomi pada kelompok perempuan nelayan Kelurahan Kedungcowek, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yang mempunyai permasalahan untuk menuju masyarakat yang produktif dalam menopang perekonomian keluarga. Adapun permasalahan secara rinci yaitu tidak dimilikinya softskill yaitu ilmu pengetahuan dan kemahiran mengolah ikan, karena kelompok mitra belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tata cara pengembangan produk hasil tangkapan nelayan yang mempunyai potensi meningkatkan kualitas hasil tangkapan. Kedua, penjualan menurun, penghasilan nelayan juga

turun di masa Pandemi Covid-19 ini. Ketiga, lemahnya ketrampilan dan teknologi produksi yang dikuasai oleh perempuan masyarakat nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Masyarakat Nelayan dan Permasalahannya.

Indonesia merupakan negara maritime yang sangat kaya akan sumber daya laut yang sangat beragam. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang $\pm 108.000 \text{ km}^2$ dan wilayah laut seluas $\pm 6,4 \text{ juta km}^2$ (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, 2020). Perairan Indonesia baik laut wilayah atau laut yang merupakan kewenangan Indonesia yaitu wilayah laut dimana Indonesia hanya mempunyai hak berdaulat, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menghasilkan jenis-jenis ikan berbagai macam jutaan ton setiap tahunnya, yang merupakan kekayaan sumberdaya hayati laut Indonesia yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. (Koesrianti, 2008) Oleh karena itu, kekayaan sumber daya laut Indonesia ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup di wilayah

pesisir. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2019 menyebutkan terdapat 12.873 desa pesisir di Indonesia (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, 2020). Wilayah pesisir menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir (Nikijuluw, 2001).

Dengan kekayaan laut yang sangat beragam seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pesisir. Namun, masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya menghadapi masalah kemiskinan, secara nasional 2,7 juta nelayan di Indonesia merupakan 25 persen angka kemiskinan nasional (2017). Selain itu di Surabaya tempat dilakukan pengabdian masyarakat, prosentase

penduduk miskinnya pada 2018 mencapai 4,88 persen termasuk didalamnya masyarakat nelayan (BPS Kota Surabaya, 2018). Mayoritas nelayan hidup di ambang batas garis kemiskinan. Pada masa Pandemi Covid-19 nelayan kampung Bulak Cumpat Kenjeran Surabaya mengeluh bahwa pendapatan mereka menurun tajam akibat sulitnya menjual hasil tangkapan ikan dan sepiya kunjungan wisatawan yang menyewa jasa perahu akibat Pandemi Covid-19 (Antarnews.com, 2020) (Atmaja, 2020). Meskipun sebelum adanya Pandemi Covid-19 masyarakat nelayan sudah mengalami kemiskinan karena situasi dan kondisi yang ada, diantaranya mereka tergantung pada sumberdaya laut dan pantai yang terbatas rentan terhadap musim dan polusi kerusakan lingkungan pesisir (Andjarwati, 2017).

Kemiskinan masyarakat nelayan merupakan pencetus dari masalah-masalah lainnya. Kemiskinan karena terjadinya bencana Pandemi Covid-19 telah menjadi penyebab naiknya angka perceraian di Surabaya, terutama daerah Kenjeran tempat PPM ini

dilaksanakan. Tahun 2020 terjadi angka perceraian yang tinggi di wilayah kota Surabaya, dan khususnya Kecamatan Kenjeran dengan penyebab terbesar karena masalah ekonomi keluarga yang bertambah parah dengan adanya Pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan ekonomi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga banyak sekali perusahaan yang tutup dan mengalami kebangkrutan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kenaikan angka perceraian di Surabaya. Data di Pengadilan Agama Surabaya per hari terdapat 40 hingga 50 gugatan cerai, yang didominasi gugatan dari pihak isteri (KompasTV.com, 2020). Tercatat sejak bulan Juni dan Juli 2020 kenaikannya cukup signifikan, bulan Juni angka 439 perkara cerai talak dan 955 cerai gugat dimana dikabulkan cerai talak 131 perkara dan cerai gugat 316 perkara. Bulan Juli 2020, terdapat cerai talak 478 perkara dan gugat cerai 1.054 perkara dimana dikabulkan 174 perkara cerai talak dan 364 perkara gugat cerai. Menurut berita dalam setahun terdapat

7.072 warga Kenjeran bercerai dimana angka ini merupakan akumulasi dari tahun 2020 dari empat kelurahan (JawaPos.com, 2021). Gugatan cerai didominasi oleh pihak isteri dimana tercatat 5.520 perkara, atau sekitar 75 persen demikian data dari situs milik Dispendukcapil Surabaya. Di kecamatan lainnya, angka gugatan cerai juga tinggi, tetapi angka ini paling tinggi se Surabaya ada di Kenjeran. Bisa jadi nanti permasalahan ini akan merembet pada naiknya angka kriminalitas. Sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi keluarga terutama pemberdayaan ekonomi isteri nelayan.

Adanya Pandemi Covid-19 penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mengalami peningkatan hingga 1,63 juta orang dibandingkan dengan periode September 2019 sudah masuk pada scenario berat karena diperkirakan akan bertambah lagi. Sektor perikanan menyumbang 3,7% dari GDP Indonesia (2020) (Pebrianto, 2020) dan diperkirakan terdapat 1 juta per tahu orang bekerja di sektor perikanan mulai dari masa praproduksi, produksi dan pasca produksi (Lokadata, 2020). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pemberdayaan

peran wanita nelayan yaitu dengan cara antara lain meningkatkan ketrampilan nelayan dan anggota keluarganya (isteri nelayan dan putri nelayan) suatu pengembangan diversifikasi usaha nelayan. Intinya, perlu dilakukan upaya pemahaman kesetaraan gender dalam rumah tangga nelayan dalam mendukung peningkatan pendapatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan jalan mengoptimalkan dalam pemanfaatan hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan daya saing masyarakat perikanan dan hal ini dapat dimulai dengan melakukan langkah-langkah pengembangan usaha perikanan berwawasan gender (Antaraneews.com, 2019). Dalam hal ini, gender diartikan sebagai pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan sebuah kategori sosial dimana kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis antara pria dan wanita ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Istilah kesetaraan gender mengacu pada kondisi setara, seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

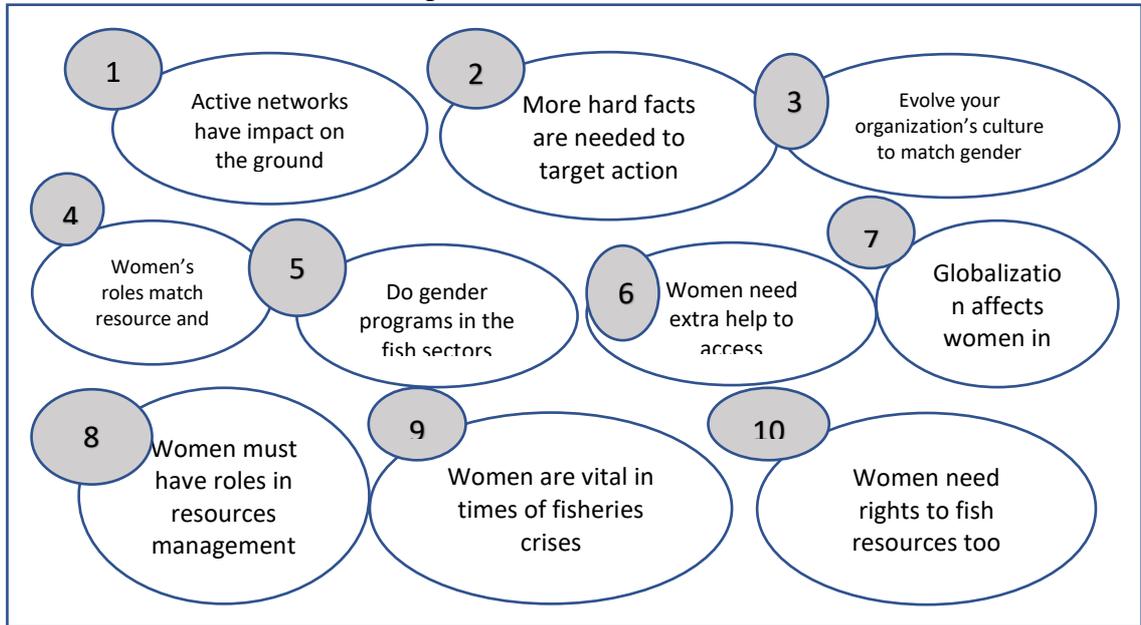
Isteri nelayan sebagai modal sosial masyarakat nelayan.

Sebagian besar masyarakat masih enggan untuk memberikan pengakuan atas keberadaan perempuan masyarakat nelayan sebagai agen

ekonomi masyarakat pesisir karena perempuan pengolah dan pemasar hasil tangkapan nelayan bukanlah seorang nelayan (Pratiwi, 2017) . Biasanya istri nelayan mempunyai pekerjaan yang ada kaitannya dengan bidang perikanan juga, menjual hasil tangkapan ikan baik secara langsung atau dimasak atau di bakar lebih dahulu. Pada intinya, istri nelayan mempunyai peran dalam menambah pendapatan keluarga (Maulana Firdaus, 2015). Namun saat ini, wanita isteri nelayan dan putri nelayan tidak mempunyai ketrampilan dan kompetensi bidang usaha lainnya sebagai alternative bagi peningkatan ekonomi keluarga meskipun mereka sangat erat bergaul dalam menyiapkan hasil tangkapan dan menjual ikan sebagai produk segar dari laut karena selama ini tidak ada inovasi ataupun diversifikasi usaha dari nelayan dalam pengolahan ikan sebagai hasil tangkap nelayan, dijual tanpa ada intervensi teknologi pangan dan pemasaran.

Pada kebanyakan kelompok perempuan masyarakat nelayan belum ada ide atau pemikiran untuk menuju pada penghasilan yang dapat menopang kesejahteraan keluarga nelayan secara berkesinambungan atau berkelanjutan (sustainability). Dalam konteks ini maka dapat dirujuk pada 10 pointers for development yang dikembangkan oleh M.J. William yang memetakan 10 poin bagi kelompok wanita nelayan menuju kemajuan (lihat Gambar 1) (William, 2001).

Gambar: 10 Pointers of Development



Sumber: M.J. William, Women in Fisheries: Pointers for Development, 2001

Menurut M.J. William terdapat 10 pointers of development bagi kelompok perempuan nelayan untuk berkembang yang dijelaskan seperti di bawah ini. Perempuan dari masyarakat nelayan harus aktif dalam jaringan (networks) yang mempunyai dampak pada kebutuhan dasar masyarakat nelayan, mempunyai organisasi yang berbudaya wawasan gender, mempunyai peran yang cocok dengan karakter sumber daya dan industry (perikanan), dan mempunyai peran dalam pengelolaan sumber daya perikanan (William, 2001). Selain itu, kelompok perempuan masyarakat

nelayan perlu dukungan ekstra atas akses bantuan dari pemerintah, perlu diakui hak-hak melautnya juga. Lebih lanjut, pointer tersebut menyebutkan bahwa harus terdapat program sektor perikanan yang berwawasan gender, karena bukan saja globalisasi telah memberikan dampak pada perempuan tetapi juga perempuan perannya sangat vital pada saat krisis perikanan. Hal ini sesuai dengan keadaan sekarang, pada saat Pandemi Covid-19 ini terjadi krisis, sehingga peran kelompok perempuan sangat penting dalam menopang perekonomian keluarga dan masyarakatnya.

Pada masyarakat pesisir, perempuan dan anak perempuan belum menjadi prioritas utama. Peran gender masih kental diterapkan pada keluarga nelayan, pekerjaan domestik sepenuhnya merupakan kewajiban pihak wanita. Hal ini berpengaruh pada persepsi mayoritas di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa nelayan itu merupakan pekerjaan laki-laki saja, sedangkan perempuan posisi mereka hanya sebagai isteri, jikapun ada wanita yang bekerja di bidang perikanan maka mereka tidak dikategorikan sebagai nelayan karena hanya laki-laki yang pergi melaut (Pratiwi, 2017). Pada kenyataannya, perempuan masyarakat nelayan yang hidup di pesisir mempunyai berbagai macam peran dan berkontribusi bagi keluarganya. Kontribusi ekonomi perempuan nelayan dalam mencurahkan tenaganya di bidang perikanan sebesar 50% - 75% untuk mendapatkan penghasilan tambahan keluarga (Heruwati, 1998) .

Menurut Adhuri et.al (2018), perempuan pesisir telah terlibat pada semua proses kegiatan ekonomi perikanan baik dari proses

pembudidayaan ikan sampai pada pengelolaan sampah di wilayah mereka (Adhuri, 2018). Namun perempuan nelayan masih dianggap sebagai pekerja berstatus rendah, tidak terampil dan tidak layak dibayar dengan adil yang menyebabkan perempuan nelayan menjadi masyarakat termarginalkan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok perempuan nelayan. Studi gender yang meneliti tentang perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki menyatakan bahwa ada kerancuan dan keambiguan tentang konsep gender dan korelasinya dengan perjuangan kaum perempuan atas pensetaraan hak. Belum ada penjelasan yang singkat dan jelas yang mudah dipahami oleh masyarakat umum tentang konsep ini dan pentingnya untuk memahami ketidakadilan sosial (Ratna Indrawasih, 2021). Dalam konteks ini badan dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pada dasarnya “gender refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed”. (WHO, 2020) Artinya gender merujuk pada karakteristik

yang dipunyai oleh wanita, pria, anak perempuan, anak laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial (oleh masyarakat). Pada dasarnya, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, antara wanita dan pria adalah sama (equal). Dengan adanya konstruksi gender dari masyarakat maka terjadi hierarchical (heirarkis) yang menciptakan inequalities (ketidak-setaraan) dalam status sosial dan ekonomi. Sebagai konstruksi sosial masyarakat, gender itu bervariasi antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya dan dapat berubah setiap waktu.

Sementara itu, Suryanto (2010 dalam Indrawasih) menemukan dalam penelitiannya bahwa sejarah perbedaan gender (gender differences) sudah terjadi sejak lama dan proses terjadinya juga panjang. (Ratna Indrawasih, 2021). Intinya, gender ini terbentuk karena banyak faktor yang melalui berbagai proses yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksikan secara sosial dan budaya, melalui ajaran keluarga, keagamaan dan negara. Hal ini yang menimbulkan gender-based discrimination yang mempunyai

persinggungan (intersects) dengan factor-faktor lain dari diskriminasi seperti misalnya etnik, status sosial dan ekonomi, disability, umur, lokasi geografis, identitas, dan orientasi seks (WHO, 2020).

Sampai saat ini, meskipun seharusnya perempuan nelayan mendapatkan peran yang sama dengan laki-laki di sektor perikanan, namun peran mereka masih termarginalisasikan dalam proses manajemen maupun kebijakan. Dalam kenyataannya ketika pendapatan suami kecil, maka isteri nelayan terdorong untuk aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan kegiatan yang masih berkaitan dengan sektor perikanan (Wawansyah, 2012). seperti pengupas kulit kepiting, pembuat kerupuk ikan, pengolah ikan asin, membuat bakso ikan dan lain sebagainya. Untuk itu kelompok perempuan masyarakat nelayan perlu diberdayakan secara ekonomi.

Usaha perikanan berwawasan gender menuju *sustainability income*.

Masyarakat nelayan Kenjeran yang bermukim di wilayah pesisir,

pekerjaan utama kepala keluarganya mayoritas adalah nelayan. Mereka telah melakukan pekerjaan sebagai nelayan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan. Lingkungan sekitar juga kurang mendukung karena kecilnya peluang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga yang berkelanjutan sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, peran istri dan putri nelayan didorong untuk ikut dalam menaikkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejalan dengan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) membuat program berupa kegiatan diversifikasi usaha nelayan yang melibatkan perempuan nelayan (KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2020).

Selama ini di wilayah Kenjeran Surabaya, isteri nelayan bekerja sebagai pengolah ikan, dengan produk yaitu ikan asin, ikan kering, kerupuk ikan dan terasi. Selain itu, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh isteri nelayan ini merupakan jenis pekerjaan informal yang tidak terikat

jam kerja dan tidak terikat pada orang lain. Baru akhir-akhir ini, kelompok perempuan masyarakat nelayan Kenjeran membuat produk olahan dari ikan dan kerang-kerangan, dimana bahan mentah ini dipilih dari hasil tangkap yang kurang mempunyai nilai jual, jika dijual secara langsung atau jika tidak diolah lebih dahulu.

Selain itu, hal yang terjadi di daerah kampung nelayan lainnya baik di Sambas atau di Bali (KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2020) juga terjadi di Kenjeran yaitu kegiatan kelompok perempuan masyarakat nelayan ini sifatnya masih belum terorganisir dengan baik. Belum ada organisasi yang mewadahi secara formal. Selain itu, kegiatan mereka rata-rata dilakukan tidak secara teratur dan belum memiliki ijin operasi serta menggunakan teknologi yang sederhana. Kelompok perempuan hanya menggunakan waktu luangnya untuk berkegiatan ekonomi ini, karena mereka merupakan kelompok tenaga kerja setengah menganggur yang memiliki waktu kerja kurang dari standar normal jam kerja dari International Labour Organization

(ILO) yaitu 40 jam/minggu (Konvensi ILO 1935 No.47) karena mereka hanya bekerja empat jam per hari. Ketentuan 40 jam/minggu ini juga diadopsi oleh ketentuan Indonesia dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 77 ayat (2).

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemberdayaan peran wanita nelayan yaitu dengan cara antara lain meningkatkan ketrampilan nelayan dan anggota keluarganya (isteri nelayan dan putri nelayan) suatu pengembangan diversifikasi usaha nelayan (KKP Pengarusutamaan Gender, 2018). Intinya, perlu dilakukan upaya pemahaman kesetaraan gender dalam rumah tangga nelayan dalam mendukung peningkatan pendapatan social ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan jalan mengoptimalkan pemanfaatan hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan dan hal ini dapat dimulai dengan melakukan langkah-langkah pengembangan usaha perikanan berwawasan gender (Antarnews.com, 2019) . Sebagian besar masyarakat masih enggan untuk

memberikan pengakuan atas keberadaan perempuan masyarakat nelayan sebagai pelaku ekonomi masyarakat pesisir karena perempuan bukanlah seorang nelayan (Pratiwi, 2017).

Saat ini, pekerjaan perempuan masyarakat nelayan kebanyakan adalah sebagai pengolah dan pemasar hasil tangkapan nelayan, wanita atau isteri nelayan dan putri nelayan tidak mempunyai ketrampilan dan kompetensi bidang usaha lainnya sebagai alternatif bagi peningkatan ekonomi keluarga meskipun mereka sangat erat bergaul dalam menyiapkan hasil tangkapan dan karakteristik ikan sebagai produk segar dari laut. Isu gender masih menjadi kendala karena masalah-masalah seperti kompetensi perempuan, kepercayaan diri dalam kepemimpinan, peran serta dalam pengambil keputusan dan rendahnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal dari pada laki-laki merupakan gap aktualisasi peran perempuan.

Kesetaraan gender saat ini masuk dalam upaya global PBB dalam pembangunan dan globalisasi yang memerangi kemiskinan dalam

tajuk yang dinamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5 yaitu Gender Equality atau Kesetaraan Gender (UNCTAD, 2016). SDG-5 ini dapat dijabarkan terdiri dari economic rights for women dan women empowerment through ICT yang mana SDG-5 ini merupakan upaya untuk mengakhiri kemiskinan (No poverty) atau SDG-1 yang harus dicapai dengan melakukan resource mobilization dan policy frameworks. Di Indonesia SDG ini dapat dirujuk pada Nawacita sebagai acuan agenda pembangunan nasional yang lebih lanjut diterjemahkan dalam arah utama RPJMN 2015-2019 hingga RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian PPN/Bappenas (2019) sejalan dengan program SDG dari PBB tersebut menyatakan bahwa kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Kelompok perempuan nelayan ini sebagai bagian dari masyarakat secara umum tidak atau belum mempunyai ketrampilan dan kompetisi serta pengetahuan yang memadai untuk peningkatan kemampuan ekonomi. Mitra PPM kelompok masyarakat nelayan, yang berperan sebagai ibu atau isteri, sebagian dari mereka, selama ini mempunyai kendala untuk mengaktualisasi diri, dan berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Padahal disisi lain, perempuan mempunyai peran strategis dalam pembangunan dan peningkatan nilai sumber daya laut yang dihasilkan masyarakat nelayan didaerahnya. Namun potensi ini yang masih terpendam, belum digali dan dioptimalkan dikarenakan kendala-kendala yang ada yang terbentuk karena factor social, budaya, ekonomi dan gender. Oleh karena itu Bappenas menempatkan strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan cara meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan

perempuan serta mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Masalah yang dihadapi Kelompok Nelayan pada masa Pandemi Covid-19.

Mitra sasaran dari pengabdian pada masyarakat ini yaitu kelompok perempuan nelayan Kenjeran Surabaya, merupakan kelompok masyarakat yang menuju atau mengarah ke ekonomi produktif, karena mereka belum ada kegiatan ekonomi yang produktif, meskipun sudah membentuk kelompok secara kecil-kecilan beranggota 15 - 20 orang yang semuanya ibu-ibu isteri nelayan. Kelompok ini juga belum mempunyai nama atau legalitas pendirian, hanya kelompok masyarakat dalam satu Rukun Tetangga (RT), tetapi sudah ada keinginan untuk membentuk kelompok yang ingin memproduksi sesuatu (abon) dari ikan.

Banyak sekali masalah kemiskinan masyarakat yang sifat dan karakternya multidimensi. Di masa Pandemi Covid-19 yaitu kurun

waktu bulan Maret 2020 sampai Mei 2021, dilaporkan bahwa terjadi penurunan harga ikan yang cukup signifikan, terutama jenis ikan tertentu yang menjadi komoditas ekspor. Penjualan hasil tangkapan mereka juga terkendala karena banyak sekali pengepul ikan tidak melayani atau mereka membatasi pembelian ikan dari nelayan atau pembudidaya. Sehingga hasil tangkapan nelayan sulit untuk dipasarkan atau dijual kepada masyarakat, atau pasar luar negeri sebagai tujuan ekspor dari perikanan Indonesia karena sedang membatasi transaksi perdagangan internasionalnya dengan negara lain saat Pandemi Covid-19 ini serta terkendala karena hampir semua negara menutup akses masuk bagi mobilitas orang dan barang.

Secara nasional, masyarakat nelayan dan pembudidaya produk hasil mereka memiliki peranan penting dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional. Di Indonesia, masyarakat perikanan dan klaster ekonomi sebidang mampu menyediakan produk perikanan sebesar 54% dari

seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat (KNTI, 2020). Menurut data di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perempuan yang bergerak di pengolahan hasil perikanan sebanyak 867 ribu orang lebih, sedangkan untuk pemasaran hasil perikanan perempuan ikut berperan hingga 2,8 juta orang (Kemenpppa, 2016).

Kondisi kehidupan nelayan dan keluarganya ternyata tidak sebesar kontribusinya pada ekonomi nasional, karena banyak sekali keluarga nelayan yang hidupnya masih di ambang batas garis kemiskinan, yaitu 2,7 juta nelayan Indonesia atau 25 persen angka kemiskinan nasional (2017). Selain itu, data juga menyatakan bahwa 53 persen keluarga di wilayah pesisir, hidup mereka masih di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan antara pemanfaatan dengan pengelolaan perikanan laut Indonesia merupakan kendala dalam meningkatkan pendapatan nelayan (Rahim, 2017). Jika semua permasalahan di atas dibiarkan berkepanjangan, maka akan berpotensi semakin

memburuknya kehidupan keluarga nelayan dan pembudidaya.

Perempuan masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang rentan yang perlu diberikan bantuan dan uluran tangan, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Ditambah lagi, masyarakat nelayan khususnya yang tinggal di wilayah Kenjeran ini letaknya tidak jauh dari kampus Unair. Gambaran tersebut di atas tentu merupakan factor penting serta mendesak untuk dicarikan solusinya dan Unair berkewajiban secara moral untuk memberikan bantuan sehingga masyarakat nelayan ini dapat melampaui semua kendala yang ada dan dapat berdaya secara ekonomi dan social.

Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat.

Setelah sempat tertunda dua kali karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sempat diperpanjang beberapa kali, maka pelaksanaan kegiatan PPM ini baru dapat dilakukan pada 15 Oktober 2021 dari rencana bulan Juni 2021. PPM

bertemakan pemberdayaan perempuan pada masyarakat nelayan Kenjeran pada masa Pandemi Covid-19. PPM kali ini berupa pemberian pelatihan dan pembimbingan pembuatan abon ikan. Adapun untuk pengolahan abon ikan, tim PPM bekerjasama dengan tim Kelompok Tani Elok Mekar Sari dari Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo yang selama ini merupakan kelompok binaan dari Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Surabaya. Kelompok ini telah berhasil berkembang menjadi suatu kelompok UMKM dan pernah menjadi juara tingkat Pemkot. Inti dari kegiatan PPM ini ingin mensinergikan kelompok perempuan yang ada di kota Surabaya untuk bersama-sama belajar, mengadakan pelatihan dan pemberdayaan.

Adapun metoda dari PPM ini dimulai dari survey tempat kegiatan yang layak dan memadai sesuai dengan persyaratan protokol kesehatan. Dipilih balai RW 08 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya karena tempatnya longgar dan memadai sesuai persyaratan prokes. Sebelum kegiatan,

sudah dilakukan persiapan-persiapan (lihat tabel1).

Tabel 1. Tahapan dan metoda kegiatan PPM

No	Rincian kegiatan	Metoda	Isi kegiatan
1	Rapat persiapan tim pelaksana	Rapat tim inti PPM	Mendiskusikan metoda dan mekanisme PPM
2	Survey tempat pelaksanaan	Pertemuan dan diskusi dengan mitra	Diskusi pemilihan tempat dan metoda PPM dengan prokes (Covid-19)
3.	Rapat koordinasi dengan mitra untuk persiapan	Diskusi tim PPM dengan Mitra.	Membahas tempat kegiatan, alat, bahan yang harus disiapkan, calon peserta.
4.	Kegiatan PPM	Penyuluhan, praktik pelatihan membuat abon ikan dengan semua peserta di tempat kegiatan.	Kegiatan PPM dengan peserta yang datang secara langsung (offline), tim PPM, Mitra dan peserta

PPM dilaksanakan bertempat di Balai RW 08 Kelurahan Semolowaru sebagai tempat dari Mitra yaitu Kelompok Tani Elok Mekar Sari, yang memberikan praktek pelatihan

membuat abon ikan. Kali ini ikan yang dipakai ikan lele, seberat 5 kg, karena budi daya ikan lele merupakan salah satu usaha dari Kelompok Tani Elok Mekar Sari, pembudidayaan ikan lele sebagai bagian dari program ketahanan pangan Pemerintah Kota Surabaya. Kegiatan PPM memberikan praktik dan pelatihan pembuatan abon ikan sehingga akan ada peningkatan pengetahuan dan kemahiran pada kelompok perempuan nelayan Kenjeran.

Tim PPM Unair bertindak sebagai fasilitator yaitu mensinergikan dua mitra untuk dapat saling berkerjasama dan belajar bersama untuk pemberdayaan kelompok perempuan di kota Surabaya di masa Pandemi Covid-19 ini dimana dalam kesempatan PPM ini didampingi oleh Dinas Ketahanan Pangan Pemkot Surabaya. Peserta PPM berjumlah 42 orang terdiri dari mitra dari Kenjeran dan mitra dari Elok Mekar Sari Semolowaru dan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Selain itu ada Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Surabaya yang juga memberikan informasi terkait ketahanan pangan.

Jumlah peserta PPM ini sudah dibatasi mengingat penyelenggaraannya masih dalam masa Pandemi Covid-19. Pelaksanaan PPM dilaksanakan dengan protocol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak.

Target dari program PPM adalah pemberdayaan ekonomi pada kelompok perempuan nelayan Kelurahan Kedungcowek, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yang mempunyai permasalahan ekonomi berupa ketiadaan pengetahuan dan manajemen untuk menuju masyarakat yang produktif dalam menopang perekonomian keluarga. Pengabdian dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Surabaya. Kegiatan PPM ini utamanya berupa praktik dan pelatihan pembuatan abon ikan. Bahan mentah berupa ikan lele seberat 5 kilo dan dihasilkan berupa 20 pack abon ikan. Para peserta sangat antusias dan bersemangat untuk belajar membuat abon ikan. Harapan peserta bahwa kegiatan PPM dapat dilakukan lagi karena Mitra merasa mendapatkan ilmu dari kegiatan PPM ini.

Para peserta PPM yang dilatih paham tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan abon ikan. Mereka dilatih bagaimana membuat abon ikan yang teksturnya bagus kering dan layak jual, dengan melakukan sendiri tahapan-tahapan dengan didampingi pelatih atau mentor dimana semua tahapan ini dipantau oleh tim PPM. Pertama, ikan lele dibersihkan dan diambil dagingnya berupa fillet ikan. Fillet ikan ini kemudian dikukus. Setelah dikukus baru ikan lele dibumbui. Setelah dibumbui, ikan kemudian digoreng. Setelah matang baru ikan dimasukkan dalam alat spinner untuk mengeluarkan minyak yang berlebihan dan menjaga supaya abon ikan tidak berbau tengik ketika lama tidak dikonsumsi.

Praktek dan pelatihan pembuatan abon ikan ini dimaksudkan produknya bisa dijual ke pasaran. Sehingga selain produk, para peserta juga diberikan informasi tentang kemasan atau packing yang bagus dan menarik dan menimbulkan keinginan dari konsumen untuk membeli. Kelompok perempuan masyarakat nelayan Kenjeran di masa dating dapat

membuat abon ikan dari ikan laut secara mandiri dengan memanfaatkan hasil ikan tangkapan nelayan Kenjeran. Dengan demikian kelompok perempuan nelayan Kenjeran dapat mengembangkan produk hasil tangkapan nelayan yang mempunyai potensi meningkatkan kualitas hasil tangkapan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.

Dalam program PPM ini juga diberikan penyuluhan informasi tentang perlunya pemasaran secara modern melalui media sosial. Dengan demikian kelompok perempuan nelayan Kenjeran ke depan nanti dapat memasarkan hasil olahan produk abon ikan melalui media sosial yang cakupannya lebih luas karena hampir setiap orang mempunyai hand phone dan tergabung dalam media sosial. Dengan demikian akan ada penghasilan yang berkelanjutan guna menopang ekonomi keluarga nelayan.

Secara umum kegiatan PPM berjalan dengan baik dan lancar, beberapa peserta memberikan kesan bahwa kegiatan ini berguna bagi mereka, karena mendapatkan pengalaman dan belajar sesuatu yang baru, pengetahuan sederhana berupa

praktik dan pelatihan membuat abon ikan dari mulai membuat fillet ikan sampai menggorengnya. Meskipun demikian, tim PPM masih mendapati adanya komitmen yang rendah karena pengaruh dari latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi dari individu isteri nelayan. Selain itu, manajemen organisasi juga lemah, belum mempunyai organisasi yang aktif dan efektif serta solid dalam meningkatkan kekompakan dan rasa kebersamaan. Hal ini terjadi karena adanya gap yaitu komunikasi antar anggota yang belum efektif. Tim PPM menyadari adanya factor-faktor ini yang bisa menjadi kendala bagi kelompok perempuan nelayan Kenjeran untuk berkontribusi secara ekonomi bagi keluarga mereka. Oleh karena itu kegiatan PPM sebisanya dilakukan secara maksimal sehingga hasilnya akan didapatkan dengan baik dan tidak sia-sia.

Terkait permasalahan komitmen yang rendah karena pengaruh dari latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi isteri atau putri nelayan dan belum ada pengetahuan tentang arti penting mengelola organisasi secara benar dan terstruktur disarankan untuk

membentuk organisasi di kelompok perempuan masyarakat nelayan Kenjeran. Kelompok perempuan masyarakat nelayan di Kenjeran memerlukan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk kontinuitas produksi.

KESIMPULAN

Metoda pengabdian masyarakat berupa penyuluhan pengetahuan menguasai iptek sederhana cara pengolahan atau budidaya ikan menjadi produk olahan jadi (abon ikan). Di samping itu, diberikan bimbingan teknis tentang penguasaan ketrampilan dan teknologi produksi kepada kelompok perempuan masyarakat nelayan, berupa praktek, dan pelatihan untuk bisa menghasilkan produk jadi (abon ikan). Ini merupakan tahap awal dari kegiatan PPM dan akan dibuat kegiatan ini bertahap, sehingga kegiatan ini berupa kegiatan PPM comprehensive dan akan mempunyai dampak keberlanjutan, dimana kelompok perempuan masyarakat nelayan ini, kelompoknya akan menjadi mitra sebagai desa binaan.

Terkait permasalahan aspek manajemen Tim PPM memandang

bahwa permasalahan pendampingan pemerintah, perlu identifikasi data yang akurat karena pemerintah perlu alasan kuat dan data yang akurat dalam memberikan dukungan pada kelompok masyarakat yang akan dibantu, sehingga bantuan itu tidak akan sia-sia. Mitra menjadi penggerak utama dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kedungcowek, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan melakukan pantauan dan evaluasi. Ke depan diharapkan wilayah Kedungcowek Kelurahan Kenjeran ini dapat

DAFTAR PUSTAKA

Adhuri, D. e. (2018). Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dengan Pendekatan Holistik dan Kolaboratif. *Policy Paper*.

Andjarwati, T. (2017, April). Pengaruh Moral Ekonomi dan Kewirausahaan Nelayan Terhadap Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Pantai Kenjeran Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 4(1), 24-35.

Antaraneews.com. (2019, October 1). *KKP Dorong Pemberdayaan Peran Wanita Nelayan*. Retrieved September 28, 2021, from Antaraneews.com: <https://www.antaraneews.com/berita/1090834/kkp-dorong-pemberdayaan-peran-wanita-nelayan>

memperoleh identitas sebagai sentra penghasil produk abon ikan yang lezat. Namun diperlukan kerja keras untuk mencapai hasil itu. Untuk langkah pertama tim akan menerbitkan buku panduan semacam buku saku pembuatan abon ikan, untuk bisa dipelajari kembali tahapan prosesnya dan dipraktekkan oleh semua yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan PPM ini sehingga menghasilkan produk yang layak jual.

Antaraneews.com. (2020, May 10). *Dampak Covid-19 dinilai mulai terasa di industri perikanan tangkap*. Retrieved from Antaraneews.com: <https://www.antaraneews.com/berita/1481973/dampak-covid-19-dinilai-mulai-terasa-di-industri-perikanan-tangkap>

Atmaja, O. (2020, April 12). *Dampak Wabah Corona, Pendapatan Nelayan Turun Drastis*. Retrieved from suara.com: <https://www.suara.com/foto/2020/04/12/192423/dampak-wabah-corona-pendapatan-nelayan-menurun-drastis>

BPS Kota Surabaya. (2018). *Profil Kemiskinan Kota Surabaya 2018*. Retrieved from <http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/po-content/po-upload/pdrb-2010->

- 2016/Profil-Kemiskinan-Kota-Surabaya-2018.pdf
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP. (2020, April 27). *Kelautan dalam Angka 2019*. Retrieved from Buku KPDA TTD (1): [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/PUBLIKASI/Buku%20KPDA%20TTD%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/PUBLIKASI/Buku%20KPDA%20TTD%20(1).pdf)
- Hany Handayani, R. R. (2015, January). Peran Gender dalam Keluarga Nelayan Tradisional dan Implikasinya pada Model Pemberdayaan perempuan di Kawasan Pesisir Malang selatan. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1(1), 1-12.
- Heruwati, E. A. (1998). Peranan Wanita Nelayan dalam Kegiatan Perikanan. *Warta Penelitian Perikanan Penelitian Indonesia (WPPI)*, IV(4), pp. 16-22.
- JawaPos.com. (2021, November 12). *Setahun, 7.072 Warga Kenjeran Bercerai Mayoritas Penggugat adalah Perempuan*. Retrieved from JawaPos.com: <https://www.jawapos.com/surabaya/21/01/2021/setahun-7-072-warga-kenjeran-bercerai/>
- Kemenpppa. (2016, Februari 23). *Menteri PP dan PA: Perempuan Nelayan, Potensi Besar dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Retrieved Agustus 27, 2021, from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/431/menteri-pp-dan-pa-perempuan-nelayan-potensi-besar-dalam-pemberdayaan-ekonomi>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019, October 28). *Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum perempuan*. Retrieved October 12, 2021, from Bappenas: <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan*. Retrieved October 11, 2021, from <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>
- KKP Pengarusutamaan Gender. (2018). *Kesetaraan Gender, KKP Prioritaskan Pemberdayaan Perempuan Nelayan*. Retrieved September 17, 2021, from KKP: <https://kkp.go.id/setjen/PUG/artikel/7847-kesetaraan-gender-kkp-prioritaskan-pemberdayaan-perempuan-nelayan>
- KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2020). *Diversifikasi Usaha, Cara KKP Berdayakan Wanita Nelayan*. Retrieved September 17, 2021, from <https://kkp.go.id/djpt/artikel/28810-diversifikasi-usaha-cara-kkp-berdayakan-wanita-nelayan>
- KNTI. (2020). *Kondisi Sosial - Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved Agustus 27, 2021, from KNTI: <http://knti.or.id/kondisi-ekonomi-nelayan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19>

- sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19-2/
- Koesrianti. (2008, Juni). Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan dengan negara Tetangga. *Mimbar Hukum*, 20(2), 394-410.
- KompasTV.com. (2020, September 16). *KompasTV.com*. Retrieved from Pengajuan Perceraian Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19: <https://www.youtube.com/watch?v=YdSnGtolOho>
- Lokadata. (2020, November 26). *Perikanan bisa jadi andalan penciptaan lapangan kerja*. Retrieved Oktober 12, 2021, from Lokadata: <https://lokadata.id/artikel/penciptaan-lapangan-kerja-perlu-didorong-sektor-perikanan-bisa-jadi-andalan>
- Maaruf, E. (2021, Agustus 03). *Angka Kemiskinan di Indonesia Naik Akibat Pandemi Covid-19*. Retrieved November 11, 2021, from Sindonews: <https://nasional.sindonews.com/read/500774/15/angka-kemiskinan-di-indonesia-naik-akibat-pandemi-covid-19-1627999725>
- Maulana Firdaus, R. R. (2015). Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga (Studi kasus di desa Penjajab, Kec Pemangkat, Kab Sambas. *Jurnal Sosek KP*, 242.
- Nikijuluw, V. P. (2001). *Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Retrieved November 08, 2021, from Proceeding ToT ICM: https://www.crc.uri.edu/download/Proceeding_ToT_ICM.pdf#page=17
- Pebrianto, F. (2020, September 8). *Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan ke PDB baru 3.7 persen*. Retrieved from Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1383928/kontribusi-sektor-kelautan-dan-perikanan-ke-pdb-baru-37-persen>
- Pratiwi, A. M. (2017, November). Masnuah, Pejuang Hak-hak Perempuan Nelayan. *Jurnal Perempuan*, 22(4), 377-383.
- Rahim, A. (2017). Analisis pendapatan usaha tangkap nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 6(2), 235.
- Ratna Indrawasih, L. P. (2021). Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1), 105-117.
- Sudarmaji, e. (2004, November). Konsumsi Ikan Lalui Kadar Mercury dalam Rambu dan Kesehatan Nelayan di Pantai Kenjeran Surabaya. *Manusia dan Lingkungan*, XI(3), 134-142.
- UNCTAD. (2016). *Development and Globalization: Facts and Figures*. Retrieved October 22, 2021, from UNCTAD:

<https://stats.unctad.org/Dgff2016/>

- Wawansyah, I. G. (2012, September). Kontribusi Ekonomi Produktif Wanita Nelayan terhadap Pendapatan Keluarga Nelayan. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 3(3), 95-106.
- WHO. (2020). *Gender and Health*. Retrieved from WHO: https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
- William, M.J. (2001). Women in Fisheries: Pointers for Development. *Global Symposium on Women in Fisheries*, (p. xiv). Kaohsiung Taiwan.
- Williams, M.J. (2001). From Women in Fisheries to Gender and Fisheries. *Global Symposium on Women in Fisheries*, 1, p. 269. Kaohsiung.